



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DHARMASRAYA

Nomor : 188/ 12 /KPTS-DPRD/ 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menjelaskan bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah merupakan instrument perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Dharmasraya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2020

Memperhatikan :

1. Hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Dharmasraya dengan Pemerintah Daerah pada hari Kamis Tanggal 14 November 2024
2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dharmasraya dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dan acuan dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

- KETIGA : Bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah karena alasan :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan Perangkat Daerah yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
  - d. akibat adanya pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk Perda Kabupaten; dan
  - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya pada DPA masing-masing Perangkat Daerah pemrakarsa rancangan Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada Tanggal 22 November 2024

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN DHARMASRAYA,



SUJITO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Bupati. Dharmasraya di Pulau Punjung
- 2. Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Dharmasraya
- 3. Alat Kelengkapan DPRD Kab. Dharmasraya



LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR : 188/ 12 /KPTS-DPRD/2024  
TANGGAL : 22 November 2024  
TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DHARMASRAYA TAHUN 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025

| NO | NAMA RANPERDA                                                                                                                                                                        | PEMRAKARSA                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Ranperda tentang Penyelenggaraan Kepemudaan                                                                                                                                          | DPRD                        |
| 2  | Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan                                                                                                                                           | DPRD                        |
| 3  | Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya | DPRD                        |
| 4  | Ranperda tentang Penyelenggaraan Koperasi                                                                                                                                            | DPRD                        |
| 5  | Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren                                                                                                                         | DPRD                        |
| 6  | Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029                                                                                                          | BAPPERIDA                   |
| 7  | Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari                                                    | PMD                         |
| 8  | Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari                                                                                      | PMD                         |
| 9  | Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah                                                                                                                        | DPMPTSP                     |
| 10 | Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal                                                                                         | DPMPTSP                     |
| 11 | Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya         | Bagian Organisasi           |
| 12 | Ranperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat                                                                                                                                            | Dinas KUMPERDAG             |
| 13 | Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharmasraya Mandiri                                                                                                                          | Bagian Perekonomian dan SDA |
| 14 | Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                                        | BKD                         |
| 15 | Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan                                                       | Dinas Pertanian             |
| 16 | Ranperda tentang Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan berbasis Data Nagari                                                                                               | Bagian Hukum                |

|    |                                                                |     |
|----|----------------------------------------------------------------|-----|
| 17 | Ranperda tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun 2024 | BKD |
| 18 | Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2025                     | BKD |
| 19 | Ranperda tentang APBD Tahun 2026                               | BKD |

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN DHARMASRAYA



SUJITO